

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana Strata
Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

Fata Jihadul Mahmud
Nim 11624103774

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441H/2020M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skrripsi yang berjudul : Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Bantan Tengah
Perspektif Fiqh Siyasah

Nama : Fata Jihadul Mahmud

Nim : 11624103774

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah, MH
NIK: 130217087



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh :

Nama : FATA JIHADUL MAHMUD
NIM : 11624103774
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : Jam, 08.30 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Irfan Fulfikar, M.Ag

Penguji I
Ade Friz Fakhrrullah, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Hertina, M.Pd

[Signatures of the Exam Panel Members]

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



[Signature of Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag]
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul **IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.**

Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari pemerintahan desa yang memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa menurut undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Desa Bantan Tengah perspektif fiqih siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun metode pengumpulan data dipenelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif analitik.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah dengan menampilkan nash Al-qur'an, dan Kaidah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 Di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam membahas dan menyepakati racangan peraturan desa bersama kepala desa, masih kurangnya dalam menampung aspirasi masyarakat desa, masih kurangnya pengawasan kinerja kepala desa dan lain-lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Bantan Tengah Prespektif Fiqih Siyasah”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ibunda Komariah dan Ayahanda Ridwan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag ,selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
- Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H.Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Abu Samah, MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs Arifuddin, MA selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8. Untuk keluargaku tercinta, Ibunda Komariah dan Ayahanda Ridwan serta kakakku tersayang Devi Nurhani yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

9. Untuk sahabat terbaikku Jarwandri Aprianto, Donalio Ramadhan, Surya Pratama Simarmata, Ridho Zulfahmi, Nursafitri dan Grup Kita.

10. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 juli 2020

Penulis,

Fata Jihadul Mahmud
Nim. 11624103774

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Letak Keadaan Geografi	15
B. Demografi	20
C. Gambaran Susunan Organisasi Desa Bantan Tengah	29
D. Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah	32
 BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Desa	36
B. Kewenangan Desa	38
C. Penyelenggaraan Pemerintahan desa	39
D. Badan Permusyawaratan Desa	39
E. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	41
F. Hak, Kewajiban Serta Larangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Tugas dan fungsi BPD	45
H. Pengertian Implementasi	46
I. Undang-undang nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa	47
J. Visi Dan Misi Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah	48
K. Pengertian Fiqih Siyasah	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Bantan Tengah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	49
B. Kendala atau Hambatan Badan Permusyawarata Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.....	76
C. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqih Siyasah di Desa Bantan Tengah.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2019	21
Tabel II.2	Sarana Pendidikan Formal Tahun 2019	23
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2019	24
Tabel II.4	Agama Yang Dianut Penduduk Tahun 2019	25
Tabel II.5	Sarana Ibadah Masyarakat Tahun 2019	26
Tabel II.6	Mata pencarian penduduk tahun 2019	27
Tabel IV.1	Daftar Kehadiran Rapat Dalam Membahas Semenisasi Pada Dusun Sepakat.....	55
Tabel IV.2	Rekapitulasi Tanggapan Responden BPD Dan Kepala Desa Telah Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Desa	58
Tabel IV.3	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Peraturan Desa Yang Telah Ditetapkan BPD Bersama Kepala Desa Telah Di Sosialisasikan Oleh BPD Ke Masyarakat	60
Tabel IV.4	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait BPD Telah Maksimal Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat	64
Tabel IV.5	Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dan Kepala Desa Bantan Tengah.....	67
Tabel IV.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Efektifitas BPD dalam melakukan pengawasan	75

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tonggak kesatuan guna untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu berupa Ideologi Negara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila. Dalam pancasila itu terdapat 5 (lima) perinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dimana pada sila ke-4 menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat musyawarah, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam setiap sendi kehidupan apabila seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi pemerintahan suatu hal yang tidak biasa ditawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktifitas mereka.¹

¹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), hal.128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.²

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa. Desa sudah menjadi daerah mandiri yang mana desa tidak lagi menjadi bawahan daerah.

Oleh karena itu desa telah mempunyai hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dan sepanjang sejarahnya juga desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju,

² Romli Elly Nurlia Ombi, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, Cosmogov, Vol.3 No.1, April, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, 2007. hal.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan demokratis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarah dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 undang-undang desa, BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pasal 55 ditegaskan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan permusyawaratan desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Badan permusyawaratan desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.⁴

Sehubungan dengan prinsip dasar negara sebagaimana yang telah diuraikan peneliti diatas terdapat kemiripan antara prinsip fiqih siyasah dengan konsep negara hukum pancasila. Dimana objek kajian fikih siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam setiap permusyawaratan.⁵ Fiqih siyasah juga membahas tentang permusyawaratan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam. Hal ini dijelaskan didalam QS Ali-imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنزِلُوكَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
فَأَعِظْ عَنَّهُمْ وَلَا تُجَافُواهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوُوهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَدَّدَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah

⁴ Abu Samah. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, suskapres, 2018), hal. 67.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁶

Musyawarah diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.⁷ Diantara ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pelaksanaan syuro.

Dan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa masih adanya penerapan yang kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dapat dilihat khususnya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya pernyataan dari pak Masduki mengenai BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa belum cukup baik dikarenakan masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui apa

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan edisi tajwid*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016).

⁷ Mohammad S. El-Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hal. 114-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja peraturan yang telah dibuat BPD yang katanya untuk kepentingan masyarakat.⁸

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan bapak Supari bahwa BPD tidak pernah turun langsung kemasyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.⁹ Adapun pernyataan Ahmad Hadi Kusmana yang menyatakan Dalam hal mengawasi pembangunan desa BPD belum cukup baik. Karena BPD tidak turun langsung kelapangan melihat bagaimana proses pembangunan seperti semenisasi jalan. Padahal didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰

Dalam hal ini penulis menemui permasalahan di desa tersebut dari hasil observasi peneliti terhadap desa tersebut, dengan itu penulis menemui permasalahan yaitu:

- a. Masih kurangnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Masing kurangnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Masih kurangnya dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁸ Masduki tokoh masyarakat Desa Bantan Tengah, *Wawancara* 5 April 2020

⁹ Supari masyarakat dusun rukun Desa Bantan Tengah, *Wawancara* 5 April 2020

¹⁰ Ahmad Hadi Kusmana tokoh pemuda Desa Bantan Tengah, *Wawancara* 4 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian fungsi dan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis masih belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis maupun secara praktisnya, maka mendorong peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul

**“IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”.**

B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya terfokus pada “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasaah”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 di desa Bantan Tengah dan Faktor Kendala?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut fiqh siyasah di desa Bantan Tengah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 di desa Bantan Tengah.
2. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut fiqh siyasah di desa Bantan Tengah.

Kegunaan penelitian ini untuk :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota BPD untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dalam sorotan fiqh siyasah.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa ditingkat desa, mereka juga memiliki lembaga yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa, dimana aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui lembaga ini, sehingga terwujudlah nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada tugas dan fungsi BPD. Jenis penelitian adalah hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan angket mengenai permasalahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). hal.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹² Populasi dalam sampel ini adalah seluruh masyarakat Desa Bantan Tengah. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Karena jumlah masyarakat di Desa Bantan Tengah berjumlah 3077 jiwa maka Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 Orang Sekretaris Desa, 4 Anggota BPD, 4 Tokoh Masyarakat Desa Bantan Tengah dan 1 Tokoh Pemuda. Kemudian penulis juga menjadikan 100 orang masyarakat Desa Bantan Tengah sebagai sampel.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002), hal.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa, ketua bpd, pegawai kantor desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi.

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Angket

Angket, merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis pula oleh responden. Yang menjadi sasaran angket dalam penelitian ini adalah 100 orang masyarakat desa Bantan Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wawancara.

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

e. Analisis Data.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁴

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

¹³ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hal.53.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986), hal.252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini maka, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Berisikan tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Bantan Tengah, kondisi geografis dan demografis, defenisi birokrasi pemerintahan, struktur kepegawaian, dan tugas dan fungsi sebagai BPD.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis mengenai pengertian desa, kewenangan desa, penyelenggaraan kewenangan desa, badan permusyawaratan desa, mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, hak, kewajiban serta larangan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota badan permusyawaratan desa (bpd), tugas dan fungsi bpd, pengertian implementasi, undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, visi dan misi badan permusyawaratan desa bantan tengah, pengertian fiqh siyasah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Mengenai Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa dan Faktor Kendala di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Letak dan Keadaan Geografi

Bantan Tengah adalah sebuah desa yang terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Bantan yaitu Selatbaru. Pada zaman dahulu orang lebih mengenal Belas dari pada Bantan Tengah untuk menyebut sebuah daerah di sebelah Sungai Liong, yang merupakan bagian dari wilayah Desa Selatbaru.

Bantan Tengah pertama kali dihuni pada tahun 1950 oleh satu keluarga keturunan Cina. Namun dibuka secara besar-besaran oleh para transmigran dari Jawa yang berdomisili di Desa Selatbaru dan beberapa penduduk dari desa yang telah berdiri sebelumnya seperti dari Bantan tua. Adapun beberapa tokoh masyarakat yang telah berjasa membuka hutan yang akhirnya menjadi sebuah perkampungan di Bantan Tengah adalah: Piyau dan Seneri warga keturunan Cina yang telah membuka dan menempati wilayah di Bantan Tengah ini sejak tahun 1950, Bapak Haji Tahir (Tahun 1952), Bapak Senen, Bapak Jumangin, Bapak Samin (Tahun 1959), Bapak Sulung dan Bapak Usup (Warga dari Desa Bantan tua, Tahun 1958), mereka membuka wilayah yang kini merupakan Dusun Belas. Bapak Marjo dan Bapak Sarimo (Tahun 1958), membuka wilayah yang kini merupakan wilayah Dusun Londang, Bapak Nyodi dan Bapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abas, Bapak Musjab, Bapak Kemis dan Bapak Mardikun (Tahun 1958) membuka wilayah yang kini merupakan Dusun Ulupulau, Bapak Lamijo dan Bapak Mangat (Tahun 1958) membuka wilayah yang kini merupakan Dusun Mentayan.

Para transmigran tersebut membuka hutan secara bersama-sama. Setelah hutan dibuka untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan, mereka pun mendirikan pula pondok-pondok kecil untuk beristirahat. Akhirnya para transmigran tersebut membentuk komunitas yang selanjutnya menjadi cikal bakal perkampungan.

Bantan Tengah, sebelum menjadi desa sendiri adalah merupakan bagian dari wilayah Desa Selatbaru. Karena wilayahnya terlalu luas dan kondisi wilayahnya agak jauh maka Kepala Desa Selatbaru menempatkan seorang wakil kepala Desa di Bantan Tengah. Bapak Haji Ihsan, sebagai Penghulu Desa Selatbaru telah menunjuk seorang tokoh masyarakat yang terkenal yaitu Bapak Haji Isa untuk menjadi Wakil Penghulu untuk wilayah Bantan Tengah.

Karena kearifan dan kebijaksanaan Bapak Haji Isa dalam mengelola dan mengembangkan Bantan Tengah, maka Penghulu Desa Selatbaru yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Bakrie, mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjadikan Bantan Tengah sebagai Desa yang baru. Alhamdulillah, usulan Bapak Bakrie mendapat tanggapan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggembirakan. Pada Tahun 1980 Bantan Tengah telah ditetapkan sebagai Desa Muda (sebutan desa hasil pemekaran desa pada waktu itu).

Bapak Imam Dasuki, sebagai tokoh karismatik yang cukup disegani oleh masyarakat di desa Bantan Tengah telah dipercayakan untuk menjadi Pejabat sementara Penghulu Desa Muda Bantan Tengah pada tahun 1980. Sekitar dua tahun pemerintahannya yaitu pada tahun 1982. Pemerintah melalui Bupati Bengkalis, Bapak Zalik Aris, pada waktu itu telah menetapkan dan mengangkat Bapak Imam Dasuki sebagai Kepala Desa Definitif yang telah sah secara de yure dan de facto. Dengan adanya SK pengangkatan tersebut maka Desa Bantan Tengah menanggalkan atributnya sebagai Desa Muda menjadi Desa Bantan Tengah yang selanjutnya akan mengelola segala urusan rumah tangga desanya secara mandiri tanpa pengawasan dan bimbingan dari desa induknya yaitu Desa Selatbaru.

Di masa pemerintahan Bapak Imam Dasuki, Bantan Tengah yang telah menanggalkan atribut lamanya sebagai Desa Muda langsung melakukan penataan pondasi pengembangan pembangunan desa. Program-program yang dicanangkan oleh Bapak Imam Dasuki sampai saat ini cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai sarana dan prasarana yang diperoleh desa dibagi secara adil di lima dusun yang ada di Bantan Tengah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang arif, bijaksana dan adil dalam menjalankan pemerintahannya. Melalui tampuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinannya Bantan Tengah pernah mendapatkan berbagai predikat terbaik. Diantaranya pernah menjadi juara pertama lomba desa tingkat Kabupaten Bengkalis. Menjadi wakil kabupaten Bengkalis untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi, dan Alhamdulillah hasilnya mendapatkan juara ke II.

Pada masa pemerintahan Bapak Imam Dasuki masyarakat Ulupulau mengajukan pemekaran desa Ulupulau pada tahun 1999. Rencana pemekaran tersebut belum disetujui oleh pihak pemerintah kecamatan Bantan karena belum ada program pemerintah tentang pemekaran desa.

Setelah kepemimpinan Bapak Imam Dasuki, Bantan Tengah dipimpin oleh Bapak Tamyiz melalui pemilihan kepala desa. Masa kepemimpinan Bapak Tamyiz juga masyarakat Ulupulau mengajukan pemekaran ke pihak kecamatan Bantan sebanyak dua kali. Tetapi tetap saja belum disetujui untuk melakukan pemekaran desa.

Pada tahun 2013 pemerintah kabupaten Bengkalis dibawah pimpinan Bapak Herlian Saleh mengadakan program pemekaran desa-desa yang ada di kabupaten Bengkalis. Termasuk juga desa Bantan Tengah.

Tahun 2014 dilaksanakannya pemekaran desa yang ada di kabupaten Bengkalis. Begitu juga Bantan Tengah ikut menjalankan program pemerintah kabupaten tersebut. Sebelum pemekaran Bantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tengah terdiri dari lima dusun, yaitu dusun Ulupulau, dusun Londang, dusun Belas, dusun Meranti Belah dan dusun Mentayan. Pada awalnya hanya dusun Ulupulau yang akan dimekarkan, akan tetapi karena pertimbangan para tokoh masyarakat Desa Bantan Tengah, masih terlalu banyak penduduknya dibanding desa pemekaran lainnya, maka melalui Kesepakatan bersama dusun Mentayan juga akan dimekarkan menjadi desa baru. Rencana pemekaran dusun Mentayan tersebut didukung oleh masyarakat dusun Mentayan itu sendiri.

Setelah dinyatakan mufakat dusun Ulupulau dan dusun Mentayan yang akan dijadikan desa baru, maka dimusyawarahkan kembali tentang tapal batas desa Bantan Tengah. Desa baru Ulupulau terdiri dari sebagian dari wilayah dusun londang dan seluruh wilayah dusun Ulupulau. Sedangkan desa baru Mentayan terdiri dari sebagian wilayah dusun belas dan seluruh wilayah dusun Mentayan. Walaupun dalam menentukan tapal batas tersebut banyak terjadi pro dan kontra dimasyarakat, akan tetapi berkat arif dan bijaksananya Bapak Tamyiz dalam menghadapi masalah tersebut sehingga semua masalah bisa terselesaikan dengan baik melalui jalan musyawarah. Sampai saat ini Bantan Tengah sah dimekarkan menjadi tiga desa yakni, desa Bantan Tengah, desa Ulupulau dan desa Mentayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Bantan Tengah terus berkembang dengan Kepala Desa dari

Awal sampai sekarang :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tahun 1967 - 1983 | : H. Isa (Kepala Desa) |
| 2. Tahun 1983 - 1998 | : H. Imam Dasuki (Kepala Desa) |
| 3. Tahun 1998 - 2000 | : Ijon Suanto (Pj Kepala Desa) |
| 4. Tahun 2000 - 2015 | : Tamyiz (Kepala Desa) |
| 5. Tahun 2015 -2017 | : Drs. Sukar (Pj Kepala Desa) |
| 6. Tahun 2017 s/d Sekarang | : Samsul Arifin, ST (Kepala Desa) |

B. Demografi**a). Batas Wilayah Desa**

Letak geografi Desa Bantan Tengah, terletak diantara :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Desa Mentayan |
| Sebelah selatan | : Desa Ulupulau |
| Sebelah Barat | : Desa Berancah |
| Sebelah Timur | : Desa Bantan Air dan Desa Teluk Papal |

b). Luas Wilayah Desa

- | | | |
|--------------------|-------|----|
| 1. Pemukiman | : 64 | ha |
| 2. Pertanian Sawah | : 4 | ha |
| 3. Ladang/tegalan | : 6 | ha |
| 4. Hutan | : 50 | ha |
| 5. Rawa-rawa | : 43 | ha |
| 6. Perkantoran | : 0,8 | ha |
| 7. Sekolah | : 5 | ha |
| 8. Jalan | : 50 | ha |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Lapangan sepak bola : 2,2 ha

c). Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 KM

d). Jumlah Penduduk

Dari data yang diperoleh dari kantor kepala desa Bantan Tengah, jumlah penduduknya sekitar 3077 orang atau 932 kepala keluarga (kk) yang sebagian besar suku jawa dan tersebar keseluruhan pelosok di desa Bantan Tengah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 1**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase %
1	Laki-Laki	1556	50,67
2	Perempuan	1521	49,33
	Jumlah	3077	100

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas dari penduduk desa bantan tengah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1556 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1521 orang, dengan demikian jumlah penduduk desa bantan tengah yaitu 3077 orang.

e). Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2

**Sarana Pendidikan Formal Di Bantan Tengah
Kecamatan Bantan**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	2
2	SD	2
3	MDA	4
4	SMP	1
5	SMU	-
6	Universitas	-
	Jumlah	12

S

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas dan juga hasil wawancara dari aparatur desa bantan tengah mengatakan bahwa sarana pendidikan formal dan informal di desa bantan tengah kecamatan bantan adalah TK yang berjumlah 2, SD yang berjumlah 2, MDA yang berjumlah 4, SLTP yang berjumlah 1, akan tetapi ada juga anak-anak yang menuntut ilmu keluar daerah.

Dengan demikian penduduk desa bantan tengah dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 3

**Tingkat Pendidikan Penduduk Di Desa Bantan Tengah
Kecamatan Bantan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	Taman Kanak-Kanak	223
2	SD	298
3	SLTP	137
4	SMA	93
5	Perguruan Tinggi	209
6	Putus Sekolah	257
7	Buta Huruf	66
	Jumlah	1283

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang taman kanak-kanak berjumlah 223 jiwa, SD berjumlah 298 jiwa, SMP berjumlah 137 jiwa, SMA berjumlah 93 jiwa, perguruan tinggi berjumlah 209 Jiwa, putus sekolah 257 jiwa, buta huruf 66 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f). Keagamaan

Penduduk Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan mayoritas Agama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 4

**Agama Yang Dianut Penduduk Di Desa Bantan Tengah
Kecamatan Bantan**

NO	AGAMA	JUMLAH ORANG
1	Islam	2578
2	Kristen	20
3	Budha	479
4	Khatolik	-
	Jumlah	3077

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat desa bantan tengah yang menganut agama Islam yang berjumlah 2578 jiwa, agama Kristen berjumlah 20 Jiwa dan agama Budha berjumlah 479 Jiwa. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa bantan tengah kecamatan bantan adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 5**Sarana Ibadah Masyarakat Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid/Mushallah	11
	Jumlah	11

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana ibadah berupa masjid dan mushalla berjumlah 11 buah. Bagi masyarakat yang beragama Islam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan yang menggunakan sarana ibadah tidak hanya untuk tempat shalat saja, akan tetapi juga digunakan sebagai tempat wirid ibu-ibu, tempat belajar seni Al-Qur'an untuk anak-anak dan remaja, dan peringatan keagamaan lainnya.

g). Sosial Ekonomi**1. Mata Pencaharian**

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebanyakan masyarakat Desa Bantan Tengah bekerja sebagai petani.¹⁵ Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor Kepala Desa Bantan Tengah

¹⁵kartika KAUR Pemerintahan, wawancara 4 maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Bantan, bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 6

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bantan Tengah
Kecamatan Bantan**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH ORANG
1	Petani	444
2	Pedagang	7
3	PNS	36
4	Swasta	236
5	Buruh	275
6	Angkatan	1
7	Tukang	26
8	Guru	56
9	Bidan/Perawat	6
10	Pensiunan	1
11	Supir/Angkutan	11
12	Jasa Persewaan	5
	Jumlah	1104

Sumber : Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan adalah petani berjumlah 444 jiwa, pedagang berjumlah 7 jiwa, PNS berjumlah 36 jiwa, swasta berjumlah 236 jiwa, buruh berjumlah 275 jiwa, angkatan berjumlah 1 jiwa, tukang berjumlah 26 jiwa, guru berjumlah 56, bidan/perawat berjumlah 6, pensiunan berjumlah 1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supir/angkutan berjumlah 11 jiwa dan jasa persewaan berjumlah 5. Maka dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas penduduk desa bantan tengah adalah sebagai petani

2. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya.¹⁶ Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Bantan Tengah yang mempunyai bermacam-macam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, jarang terjadi pembenturan dan tidak pernah terjadi kejadian anarkis antara sesama suku tersebut. Adapun suku-suku yang terdapat di desa bantan tengah kecamatan bantan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suku Melayu
2. Suku Jawa
3. Suku akid
4. Suku Minang
5. Suku Tionghoa

Diantara suku tersebut mempunyai adat-istiadat tersendiri dalam masing-masing suku, seperti dalam acara keramaian tiap-tiap suku menampilkan kesenian sukunya sendiri.

C. Gambaran Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bantan Tengah

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.¹⁷ Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa.

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

¹⁷ Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Bantan tengah terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Perencanaan
4. Kaur Tata Usaha dan Umum
5. Kaur Keuangan
6. Kepala Seksi Pelayanan
7. Kepala Seksi Kesejahteraan
8. Kepala Seksi pemerintahan
9. Dan empat orang kepala dusun.

Struktur pemerintah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut ¹⁸:

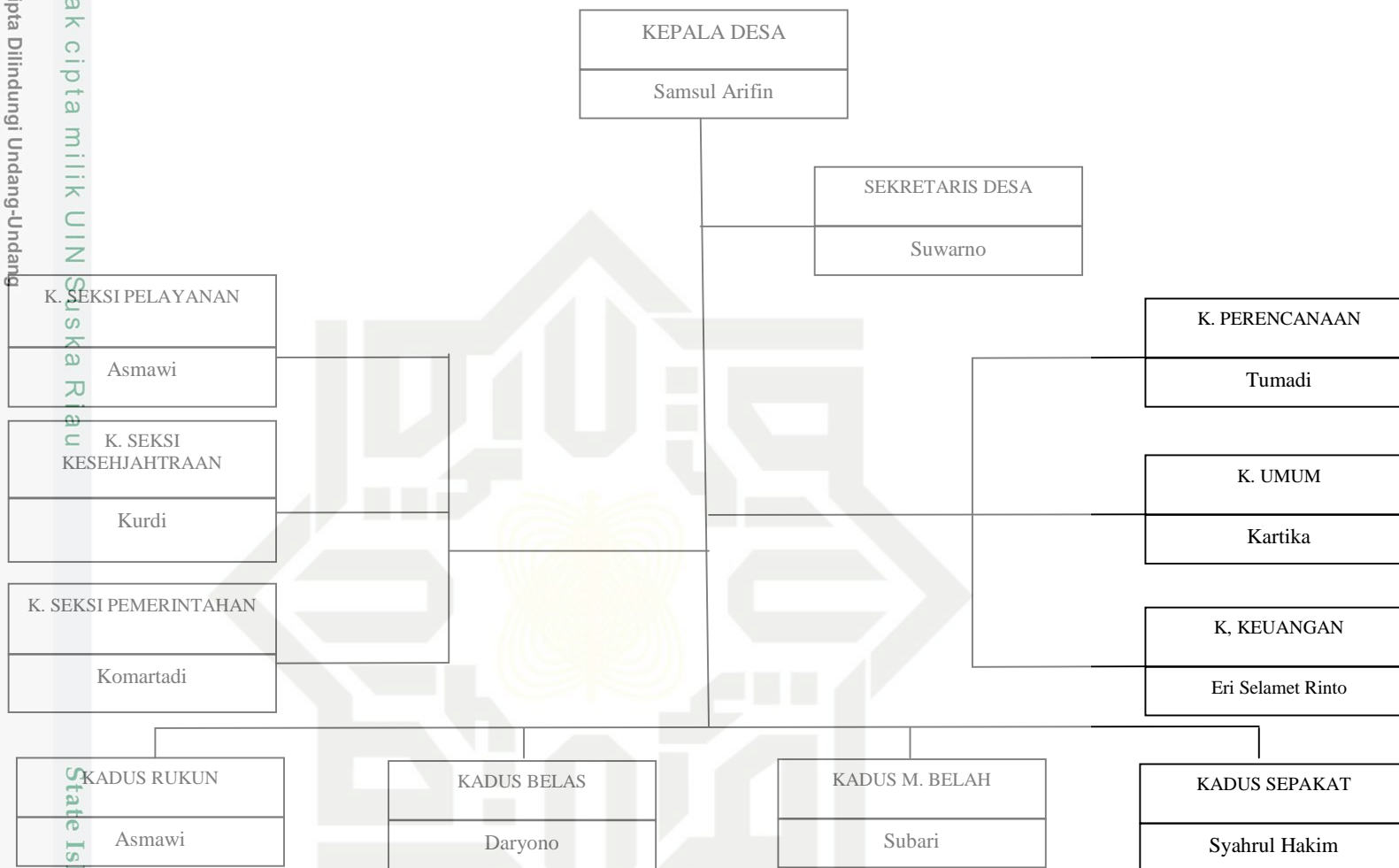
¹⁸ Monografi Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Data dari kantor Desa Bantan Tengah Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bantan Tengah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama pemerintahan desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan kepala desa. Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkan dalam Tata Tertib BPD sendiri dalam Pasal 1 huruf b Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan BPD. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri.¹⁹

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Jumlah anggota BPD di desa Bantan Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang

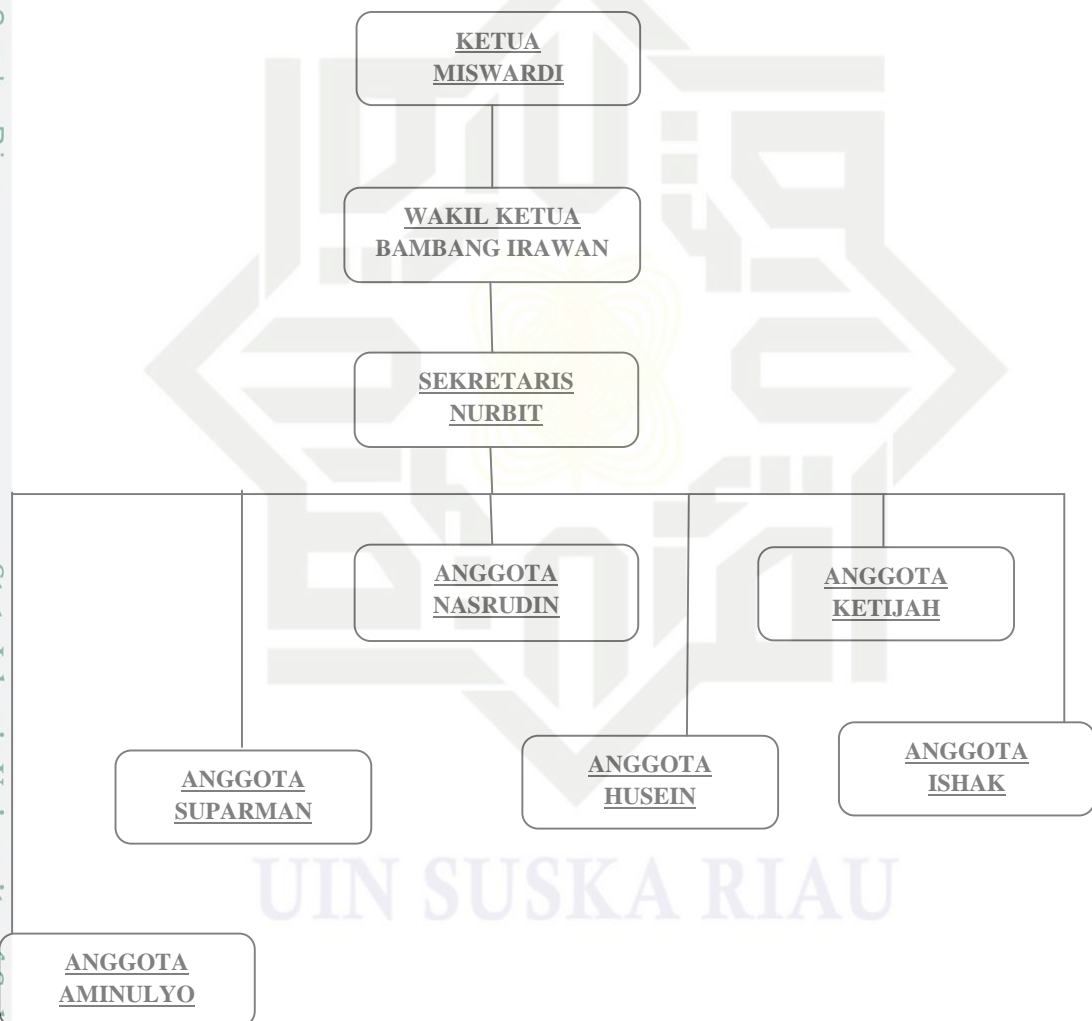
¹⁹ Widjaja HAW, *Op, Cit.* hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sekretaris : 1 orang
4. Anggota : 6 orang

Adapun struktur pengurus BPD Desa Pulau Sengkilo dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Sumber: Data dari kantor Desa Bantan Tengah tahun 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Desa

Didalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang.²⁰ Selanjutnya, pada pasal 2 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.²¹

Menurut orang awam, desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya tercirikan antara lain: mata pencaharian bertumpu pada sektor pertanian, tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek peradabannya. Sedangkan dipandang dari sudut ketatanegaraan atau pemerintahan, desa dipahami sebagai bagian dari organisasi kekuasaan negara atau pemerintahan atau sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan pemeritahan negara.

Jadi dapat disimpulkan, Desa adalah kesatuan masyarakat

²⁰ undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1

²¹ undang-undang dasar 1945 pasal 2 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa, atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota.²² Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah, dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman.

²² Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam Peraturan Daerah, yang mana kepala desa harus bisa mengabdikan dan melayani masyarakat, seluruh kepentingan pribadi tidak boleh diikutsertakan dalam menjalankan tugasnya.

B. Kewenangan Desa

Pada pasal 18-19 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Kemudian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur lebih lanjut dalam Permendesa No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal

²³ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 18-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usul dan kewenangan lokal berskala desa.

C. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan local
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Sedangkan mengenai Musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah desa diatur pada pasal 54 UU No.6 Tahun 2014 dan pengaturan selanjutnya diatur melalui Permedesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

D. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pemerintahan Desa merupakan symbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa sebagai Badan kekuasaan rendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Dalam menjalankan perannya Kepala Desa perlu bekerja sama dengan badan lain yang ada dilingkungannya supaya dalam melaksanakan roda pemerintahan desa terjadi kesinergisan untuk saling menunjang badan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Legislative Desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama

²⁴Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Balai Aksara, 1986),Cet. Ke-5, hal.30-31.

²⁵Dedy Supria, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta GramediaPustakaUmum : 2001), hal 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DESA serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap penyelenggara PERDES, APBD, serta Keputusan Kepala Desa.²⁶

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Bantan Tengah yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁷

E. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi, social politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia memilih.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Abu Samah. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru : suskapres, 2018), hal, 62.

²⁷ Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo), hal 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan pertama atau berpengetahuan yang sederajat.
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pendaftaran.
6. Sehat jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan tidak terganggu jiwa maupun ingatan.
7. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.
10. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di desa setempat.²⁸

Anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantan Tengah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik dari segi intelektual, pengalaman dan lain-lain.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh panitia pemilih yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilaksanakan dengan cara langsung dipilih oleh masyarakat

²⁸Nurbit Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Wawancara* 28 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dipilih dalam rapat pemuka masyarakat dengan cara pemilihan langsung, siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak maka calon Badan Permusyawaratan Desa akan diangkat oleh masyarakat sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

F. Hak, Kewajiban Serta Larangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantan Tengah sebagai suatu lembaga Desa tentulah mempunyai beberapa hak dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan dalam rangka menjalankan perannya dilingkungan masyarakat di Desa Bantan Tengah.

Adapun dalam pasal 61 diatur mengenai hak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain adalah :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsional anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁹

Selanjutnya, dalam pasal 62 diatur anggota BPD berhak :

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;

²⁹ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyiapkan usul dan atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Mendapatkan tunjangan dari anggaran dan belanja desa.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan bhineka tunggal ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat masyarakat desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Adapun larangan-larangan yang wajib ditaati oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantan Tengah antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, dan melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah, pemerintah kabupaten dan masyarakat desa
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan, berbuat tidak jujur dan tidak adil, dan lain-lain.

G. Tugas Dan Fungsi Bpd

Badan permusyawaratan desa secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonisasi dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.³⁰

H. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan

³⁰ Permendagri No 110 tahun 2016 pasal 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula.³¹ Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.³²

I. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa berbicara mengenai desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

³¹Syukur, Abdullah.1987.*Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, hal.40.

³²<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

J. Visi Dan Misi Badan Permasyarakatan Desa Bantan Tengah

a. VISI

Mewujudkan pelayanan yang baik sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam merancang, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa menuju pemerintah yang transparan, mandiri, adil, makmur dan sejahteratanpa diskriminasi gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. MISI

- Meningkatkan peran BPD dalam menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah pendukuhan dan musyawarah desa.
- Meningkatkan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Meningkatkan kearifan dan potensi lokal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

K. Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut : ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³³ Sementara mengenai asal kata *siyasah* di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*.

³³ Mujar Ibnu Syarif, dkk. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada d dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

³⁴ A. Djazuli. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah, (Penerbit Kencana Perdana Media Grup, 2009), hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan secara komprehensif yang dituangkan pada pembahasan sebagaimana bab-bab sebelumnya, maka penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Bantan Tengah yaitu fungsi BPD sebagai Mitra Pemerintahan (legislasi). BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah, sebagai Wakil masyarakat BPD harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan sebagai Pengawas BPD mengawasi setiap kegiatan pemerintahan dan kinerja Kepala Desa.

Peran tersebut dijalankan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan, dari data yang didapat berdasarkan responden anggota BPD dan responden masyarakat serta perangkat desa, bahwa anggota BPD Desa Bantan Tengah belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh BPD, semua hasil wawancara dan angket yang telah dilakukan berdasarkan responden masyarakat semua memberikan pernyataan bahwa masih kurangnya BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disisi lain dari hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan responden Ketua BPD dan anggotanya menyebutkan bahwa mereka telah menjalankan semua tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Bila Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya tidak bisa mengakomodir suatu problem maka Islam memberikan kelonggaran bagi seorang imam/khalifah untuk berjihad menemukan suatu hukum/ membuat peraturan untuk menyelamatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam kaidah fiqhiyah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Kelonggaran yang diberikan oleh Islam tentunya juga masih dibatasi oleh syari'at yaitu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih mensosialisasikan peraturan desa yang berlaku, apapun hasilnya agar masyarakat di Desa Bantan Tengah mengetahui dan bisa dipatuhi secara bersama. Apalagi agar masyarakat mengetahui perkembangan desa yang terjadi sekarang ini, bersikaplah secara transparansi kepada masyarakat sekitar.
- b. Diharapkan kepada seluruh anggota BPD agar lebih meningkatkan lagi penggalian dan menyerap aspirasi masyarakat desa agar keinginan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persad.
- A.Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat daam Rambu-rambu Syariah*. Penerbit Kencana Perdana Media Grup.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-quran dan terjemahan edisi tajwid*. (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Herdiansyah Haris. 2010. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : salemba humanika..
- Iqbal, Muhammad. 2014 . *Fiqih Siyasah*, Jakarta. Prenada Media Group.
- Josef riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. . Jakarta PT. Raja Grafindo.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M, Hajar. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Mujar Ibnu Syarif, dkk. 2008. *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Penerbit Erlangga.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Samah, Abu. 2018. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru. suskapres.
- S. El-Awa. Mohammad. 1999. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soekanto. Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakrta: Universitas Indonesian Press.
- Syukur Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*.Persadi,Ujung Pandang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriady Dedy. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Gramedia Pustaka Umum.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian hukum dalam Praktek*. Jakarta: sinar Grafika.

B. Kitab Undang-undang

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Permendagri No 110 tahun 2016

C. Jurnal

Romli Elly Nurlia Ombi, 2007, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, Cosmogov, Vol.3 No.1, April, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang.

Kurniawan Riska Nur Muhamad, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Binabaru Kecmatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol. 1 April, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau.

D. Web

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Foto bersama Bapak Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah



Foto bersama Bapak Miswardi selaku Ketua BPD Desa Bantan Tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Supari Tokoh Masyarakat Desa Bantan Tengah



Foto bersama Bapak Muriadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Bantan Tengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Kakanda Ahmad Hadi Kusmana selaku Tokoh Pemuda Desa Bantan Tengah





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06
Tahun 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" yang
dibuat oleh :

Nama : FATA JIHADUL MAHMUD
NIM : 11624103774
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
Waktu : Jam, 08.30 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua : H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris : Erfan Zulfikar, M.Ag

Penguji : Ade Faiz Fakhruallah, M.Ag

Penguji : Dr. Hj Hertina, M.Pd

(Handwritten signatures of the examination team members)

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 119750801 200701 023

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1862/2020

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Fata Jihadul Mahmud
NIM	: 11624103774
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: KANTOR DESA BANTAN TENGAH DAN KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANTAN TENGAH

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANTAN TENGAH MENURUT FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



rs. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANTAN
KEPALA DESA BANTAN TENGAH

Jalan H. Isa Nomor 005 Telepon :

Fax.

BANTAN

Kode Pos : 28752

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400/SKR/02

Berdasarkan Surat Camat Bantan Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Riset, dan hal tersebut dengan ini Kepala Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan ini memberikan kesempatan kepada :

Nama : **FATA JIHADUL MAHMUD**
Tempat Tanggal Lahir: Bantan Tengah, 16-07-1998
NIM : 11624103774
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S. I
Alamat : Jl. Pln RT. 002 RW. 014 Dusun Sepakat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Untuk Melaksanakan Penelitian di Wilayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Mulai 19 Maret s/d 19 Juni 2020, dengan judul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantan Tengah Menurut Fiqih Siyasah"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebarangnya, untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Bantan Tengah, 23 Maret 2020

KEPALA DESA BANTAN TENGAH
KECAMATAN BANTAN

SAMSUL ARIFIN, ST



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANTAN TENGAH

KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

Alamat : Jl. PLN Desa Bantan Tengah Kec.Bantan Kab. Bengkalis Kode Pos 28752

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 003/BPD-BT/III/2020

Berdasarkan surat Camat Bantan tanggal 19 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Riset, sehubungan hal tersebut dengan ini Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan ini memberikan kesempatan kepada :

Nama : **FATA JIHADUL MAHMUD**
 Tempat Tanggal Lahir: Bantan Tengah, 16 Juli 1998
 NIM : 11624103774
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Universitas : UIN Suska Riau
 Jenjang : S.1
 Alamat : Jln. PLN RT. 002 RW. 014 Dusun Sepakat Desa Bantan Tengah
 Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Untuk melaksanakan penelitian diwilayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, mulai 19 Maret s/d 19 Juni 2020, dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bantan Tengah Menurut Fiqih Siyasah"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantan Tengah, 24 Maret 2020
 Ketua BPD Bantan Tengah
 Kecamatan Bantan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31981
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.0019/1862/2020 Tanggal 12 Maret 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FATA JIHADUL MAHMUD
2. NIM / KTP : 11624103774
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BANTAN TENGAH MENURUT FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : 1. DESA BANTAN TENGAH KECAMATAN BANTAN
2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTAN TENGAH KECAMATAN BANTAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Maret 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

061/DPMPTSP-JU/III/2020/270

Rekomendasi

Bengkalis, 17 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Camat Bantan
2. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Bantan Tengah
di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31981 tanggal 09 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: FATA JIHADUL MAHMUD
Alamat	: Jl. PLN Dusun Londang RT. 002 RW. 004 Desa Bantan Tengah Kec. Bantan
NIM	: 11624103774
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
"Implementasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantan Tengah Menurut Fiqih Siyasah".
2. Lokasi Penelitian :
1. Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan; 2. Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 17 Maret 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BANTAN

Jalan Soekarno - Hatta - Selatbaru

E-mail : kec.bantan@bengkalis.kab.go.id

Kode Pos : 28752

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selatbaru, 19 Maret 2020

: 100/TAPEM/149
: Biasa
: -
: Rekomendasi Riset

Kepada :
Yth. Kepala Desa Bantan Tengah
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPTSP-JU/III/2020/270 tanggal 17 Maret 2020, dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/31981 tanggal 09 Maret 2020, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, sehubungan hal tersebut kami beritahukan kepada saudara bahwa :

Nama : **FATA JIHADUL MAHMUD**
NIM : 11624103774
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S.1

Yang bersangkutan bermaksud akan mengadakan riset dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Implementasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bantan Tengah Menurut Fiqih Siyasah"

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan Rekomendasi di wilayah saudara sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku. penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2020, dan hasil risetnya dilaporkan Kepada Camat Bantan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. CAMAT BANTAN
Kasi Pelayanan Umum

KHANAFIAH, S.Sos
PENATA TK.I

NIP. 19720518 200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FATA JIHADUL MAHMUD,

Lahir di Bantan Tengah pada tanggal 16 Juli 1998. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda, Ridwan dan ibu Komariah. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 06 Bantan Tengah, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Ar-Rasyidin Bantan Tengah, Riau, 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Bantan, dan lulus pada tahun

2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA BANTAN TENGAH PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.”** Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 11 Agustus 2020 jurusan hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).